



2024

KLIPING DIGITAL NARKOTIKA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SELASA, 2 APRIL 2024

perpustakaan.bnn.go.id

(021) 8087-1566 Ext: 789



MEDIA INDONESIA
REFERENSI BANGSA

The Jakarta Post
BNN's bold, fearless independent

Kontan
Marian Bisnis & Investasi

JORAN JAKARTA

58 KOMPAS
AMANAT HATI-NURANI RAKYAT

GATRA
RAI RAMAI

to defend skeptical stance on digital goods tax moratorium at WTO

Sempat Gagal Bisnis
Meski sempat terbukti skandal saat pertama kali berbisnis, Parker Conrad kini sukses menjadi miliarder

Saham Emiten Bank Menanti Tuah Rilis K



Kebijakan Pemerintah | Insentif Perlu Diberikan dalam Pengadaan

Melanjutkan Episentrum Pertumbuhan di ASEAN

AIRLANGGA DIGOYANG | RAGU-RAGU PAKAI QRIS

Ekonomi Ja
a ASEAN



ANTARANEWS.COM, SELASA / 02 APRIL 2024

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/4038696/kepala-bnn-ingatkan-pekerja-migran-soal-narkotika-di-luar-negeri>

Kepala BNN ingatkan pekerja migran soal narkotika di luar negeri

Senin, 1 April 2024 19:31 WIB



Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Marthinus Hukom (kiri) saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (1/4/2024). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengingatkan para pekerja migran Indonesia soal bahaya peredaran narkotika di luar negeri.





"Mereka biasanya akan mengincar warga negara Indonesia, tak terkecuali para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di negeri orang. Para pengedar ini biasanya akan mencari pelanggan dengan modus mendatangi tempat-tempat wisata, mencari WNI untuk diajak mengobrol lalu menawarkan barang haram yang mereka jual," katanya di Jakarta, Senin.

Penegasan itu juga disampaikan Marthinus saat pelepasan pekerja migran Indonesia yang siap berangkat ke Korea Selatan difasilitasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menurut dia, ketika bertemu dengan WNI lain di luar negeri, para pekerja migran cenderung membuka diri tanpa mendalami siapa orang yang mereka ajak berinteraksi tersebut.

Kepala BNN berharap para pekerja migran tidak termakan hasutan para pengedar narkoba di luar negeri.

Selain itu, Marthinus juga menjelaskan modus lainnya soal kerawanan pekerja migran yang dijadikan alat untuk mengirimkan narkoba dari satu negara ke negara lainnya.

Para pekerja migran Indonesia lantas diingatkan jangan mudah menerima titipan barang dari orang di luar negeri untuk dibawa melintas ke negara lain atau dibawa pulang ke Indonesia.





"Kadang-kadang mereka-mereka itu menggunakan kelengahan kita. Ketika kita mau pulang dari satu tempat di luar negeri, disusupi satu barang saja, adik-adik tidak mungkin tidak tahu," ungkapnya.

Ia pun mengingatkan para pekerja migran untuk terus menyadari tujuan awal bekerja di luar negeri adalah untuk mencari rezeki yang halal.

Marthinus juga meminta para pekerja migran untuk terus membangun komunitas yang baik dengan sesama pekerja migran untuk memperkuat dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Selama ini kan cita-cita kita adalah menjadi tulang punggung keluarga, dalam mencari nafkah, mencari uang dan bekerja keras di luar negeri. Cita-cita luhur ini jangan dibelokkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan," katanya menegaskan.





JAKARTA.TRIBUNNEWS.COM, SELASA / 02 APRIL 2024

Sumber: <https://jakarta.tribunnews.com/2024/04/01/kepala-bnn-ungkap-modus-pengedar-narkoba-cari-pelanggan-wni-di-luar-negeri-pmi-jangan-sampai-kena>

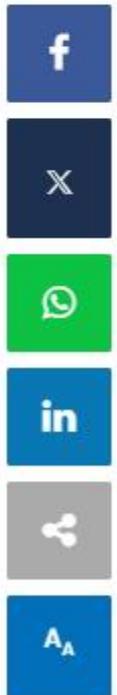
Kepala BNN Ungkap Modus Pengedar Narkoba Cari Pelanggan WNI di Luar Negeri: PMI Jangan Sampai Kena

Senin, 1 April 2024 12:16 WIB

Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Ferdinand Waskita Suryachya



Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom menyampaikan arahannya soal bahaya peredaran narkoba di luar negeri kepada para calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Korea Selatan.



TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Marthinus Hukom menyampaikan arahannya soal bahaya peredaran narkoba di luar negeri kepada para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Korea Selatan.





Marthinus menjabarkan sejumlah modus pengedar narkoba di luar negeri dan mewanti-wanti para PMI untuk tidak terhasut akal bulus para pengedar narkoba di tempat mereka bekerja.

Menurut Marthinus, tak sedikit dari WNI yang menetap di luar negeri mencari duit dengan cara yang haram dengan berjualan narkoba.

Mereka biasanya akan mengincar WNI-WNI lainnya, tak terkecuali para pekerja migran Indonesia, yang sedang bekerja di negeri orang. Para pengedar ini biasanya akan mencari pelanggan dengan modus mendatangi tempat-tempat wisata, mencari WNI untuk diajak mengobrol lalu menawarkan barang haram yang mereka jual.

"Dia datang ke tempat di mana orang plesiran, untuk mencari mangsa. Pasti didatangi, ngobrol, kenalan, interaksi. Jangan sampai kita terjebak oleh strategi kelompok ini," kata Marthinus di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4/2024).

Mantan Kepala Densus 88 Antiteror itu mengatakan, para PMI dikhawatirkan rentan termakan hasutan para pengedar narkoba karena memiliki kerinduan akan kampung halaman.

Ketika bertemu dengan WNI lain di luar negeri, para PMI cenderung membuka diri tanpa mendalami siapa orang yang mereka ajak berinteraksi tersebut.





"Biasanya kita begini nih, karena kita berada di satu tempat yang jauh dari komunitas kita, tertarik dari akar-akar sosial kita, lalu kita melihat eh ada orang Indonesia nih, ada orang kita nih," ucapnya.

"Karena ada kerinduan berhubungan dengan bangsa sendiri. Tapi di sini harus hati-hati, dicek betul orang ini kerja di mana. Jangan-jangan, karena dia orang Indonesia yang sedang berjualan barang ini, terus dia pengen membangun jaringannya, terus dia mulai mendekati," tegas Kepala BNN.

Selain itu, Marthinus juga menjelaskan modus lainnya terkait kerawanan PMI dijadikan alat untuk mengirimkan narkoba dari satu negara ke negara lainnya.

Para PMI lantas diingatkan jangan mudah menerima titipan barang dari orang di luar negeri untuk dibawa melintas ke negara lain atau dibawa pulang ke Indonesia.

"Kadang-kadang mereka-mereka itu menggunakan kelengahan kita, ketika kita mau pulang dari satu tempat di luar negeri, disusupi satu barang saja, adik-adik tidak mungkin tidak tahu," kata Marthinus.

Ia pun mengingatkan para PMI untuk terus menyadari tujuan awal bekerja di luar negeri adalah untuk mencari rezeki yang halal.

Marthinus juga meminta para PMI untuk terus membangun komunitas yang baik dengan sesama pekerja migran untuk memperkuat dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.





BATAM.TRIBUNNEWS.COM, SELASA / 02 APRIL 2024

Sumber: <https://batam.tribunnews.com/2024/04/01/pemko-tanjungpinang-akan-tes-urine-pegawainya-buntut-oknum-satpol-pp-terjerat-narkoba>

Pemko Tanjungpinang Akan Tes Urine Pegawainya Buntut Oknum Satpol PP Terjerat Narkoba

Senin, 1 April 2024 20:28 WIB

Penulis: [Alfandi Simamora](#) | Editor: [Dewi Haryati](#)



lihat foto



TES URINE - Kepala BNN Tanjungpinang, Kombes Pol Heriyanto siap bantu Pemko Tanjungpinang untuk tes urine pegawai di lingkungan Pemko Tanjungpinang

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan menyayangkan ada oknum Satpol PP Tanjungpinang yang terlibat kasus narkoba.





Menurut Hasan, perbuatan itu sudah melanggar hukum, sehingga tidak ada toleransi, dan akan diberhentikan.

"Hal itu sudah melanggar hukum, sehingga tidak ada toleransi," ucapnya, Senin (1/4/2024).

Ke depan untuk pencegahannya, Pemerintah Kota atau Pemko Tanjungpinang berencana melakukan tes urine kepada pegawai Pemko.

"Terkait tes urine, nanti akan kami koordinasikan dulu dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanjungpinang," ungkapnya.

Hasan tidak lupa mengimbau agar pegawai di Pemko Tanjungpinang menghindari yang namanya narkoba, baik itu menggunakan atau melakukan pengedaran.

"Inikan terkait hati dan pribadi masing-masing. Kadang bingung juga seorang pegawai, saya bingung kalau konotasinya masih memakai atau mengedar narkoba. Apalagi di Pemko Tanjungpinang termasuk tinggi juga gaji dan tunjangan. Tapi kok masih kurang," tutupnya.

Sementara itu, BNN Tanjungpinang siap membantu jika Pemko ingin melakukan tes urine terhadap pegawai di lingkungannya.

"Kami siap membantu Pemko Tanjungpinang. Tapi hingga saat ini belum ada permintaan dari Pj Wali Kota Tanjungpinang," ucap Kepala BNN Tanjungpinang, Kombes Pol Heriyanto.

Penulis: Alfandi Simamora | Editor: Dewi Haryati





EN.ANTARANEWS.COM , SELASA / 02 APRIL 2024

Sumber: <https://en.antaraneews.com/news/309780/remain-alert-against-drug-syndicates-bnn-tells-migrant-workers>

Remain alert against drug syndicates, BNN tells migrant workers

April 1, 2024 21:03 GMT+700



Illustration - Migrant workers of Indonesia. (ANTARA/Yuniati Jannatun Naim)

“They tend to target Indonesian nationals, including those working abroad.”





Jakarta (ANTARA) - Head of the National Narcotics Agency (BNN), Police Commissioner General Marthinus Hukom, has urged Indonesian migrant workers to remain vigilant against overseas drug syndicates.

"They tend to target Indonesian nationals, including those working abroad. Usually, drug dealers will eye customers by visiting tourism destinations to chat with Indonesians before offering them the forbidden items they are selling," he informed in Jakarta on Monday.

He made the statement during a send-off ceremony for Indonesian migrant workers leaving for South Korea, which was held by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI).

When abroad, Indonesian migrant workers tend to open up to any fellow Indonesian nationals they meet without first getting clear information on who they are interacting with, he observed.

He then warned Indonesian migrant workers against easily falling for offers from drug dealers abroad.

The BNN head noted that narcotics syndicates have been using migrant workers to deliver drugs from one country to another.

For that reason, he emphasized, Indonesian migrant workers should not easily accept goods from people abroad and take them to another country, including Indonesia.





"They tend to exploit our negligence. They can infiltrate items on you as you plan to return to Indonesia," he told Indonesian migrant workers.

He then urged the workers to stick to their initial goal of working abroad, that is, making money legitimately.

"Your true goal is to be the 'backbone' of your families by making money through hard work abroad. Do not let anyone alter this noble goal for their benefit," he emphasized.

He also appealed to Indonesian workers to continue to maintain harmonious relations with fellow migrant workers to protect themselves from unwanted events.





HARIANGARUTNEWS.COM, SELASA / 02 APRIL 2024

Sumber: <https://hariangarutnews.com/2024/04/01/bnn-ri-apresiasi-jambore-ganna-jawa-barat-hendrajit-putut-widagdo-secara-mandiri-penggiat-harus-mampu-wujudkan-lingkungan-bersih-narkoba/>

BNN RI Apresiasi Jambore GANNA Jawa Barat, Hendrajit Putut Widagdo : Secara Mandiri Penggiat Harus Mampu Wujudkan Lingkungan Bersih Narkoba

Jurnalis Harian Garut 1 April 2024
FOKUS 191 Views



HARIANGARUTNEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan guna memupuk Jiwa Korsa organisasi Yayasan Gerakan Anti Narkotika Nusantara Amarta (GANNA), Melatih Kepemimpinan dan Keterampilan Komunikasi, serta memberikan pembekalan untuk menjadi Penyuluh Anti Narkoba di lingkungan masyarakat, DPW GANNA Provinsi Jawa Barat akan menggelar Jambore dan Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Anti Narkoba Tahun 2024.





Kegiatan yang akan melibatkan 200 orang perwakilan anggota dan pengurus GANNA mulai tingkat DPC dan DPD dari 27 Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat yang akan digelar di Obyek Wisata Cipanas Galunggung Kabupaten Tasikmalaya ini, mendapat apresiasi dan dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

Ketua Umum DPP GANNA Indonesia, BRM Dimas Bayu Amarta, melalui Ketua DPW GANNA Provinsi Jawa Barat, Igie N. Rukmana mengungkapkan, bahwa kegiatan ini merupakan cita-cita luhur Yayasan GANNA yang sebelumnya akan digelar pada tahun 2022 di Yogyakarta.



Para Duta dan Milenial Penggiat Anti Narkoba GANNA.

“Sejak tahun 2017, organisasi Penggiat Anti Narkoba dibawah komando bapak BRM. Dimas Bayu Amarta ini intens melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hingga pada tahun ini kami memutuskan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita beliau untuk





menyatukan anggota dan pengurus GANNA dalam acara Jambore dan Diklatsar ini,” ungkap Igie, Senin (01/04/2024).

Menanggapi hal ini, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dit. Peran Serta Masyarakat BNN RI, Hendrajit Putut Widagdo, S.Sos., M.M., M.Si menyampaikan apresiasi pada acara Jambore dan Diklatsar yang akan digelar oleh DPW GANNA Jawa Barat. Ia berharap, para penggiat mampu menjadikan lingkungannya turut peduli dan berpartisipasi secara mandiri mewujudkan lingkungannya bersih narkoba.

“Tentunya kami mengapresiasi acara yang sangat positif yang akan digelar oleh DPW GANNA Jawa Barat tersebut. Karena kegiatan Jambore GANNA ini nantinya akan mempertemukan para penggiat yang peduli untuk memperdalam pemahaman mereka tentang bahaya narkoba serta strategi pencegahan yang efektif,” ungkap Hendrajit yang juga Dewan Penasehat DPW GANNA Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan bertema “Mari Kita Jadikan Hari Kebangkitan Nasional Sebagai Refleksi Menuju Indonesia Bersinar” ini, dipusatkan di Kawasan Obyek Wisata Galunggung Cipanas, Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 18-19 Mei 2024. (*)





INPUTRAKYAT.CO.ID, SELASA / 02 APRIL 2024

Sumber: <https://inputrakyat.co.id/bnn-sulsel-di-praperadilan-kuasa-hukum-pemohon-harap-pn-palopo-kabulkan-permohonan/>

BNN Sulsel di Praperadilan, Kuasa Hukum Pemohon Harap PN Palopo Kabulkan Permohonan

Admin 4 Min Baca
2 April 2024



INPUTRAKYAT_PALOPO,—Tim Advokat YBH Wija Luwu yang juga tergabung dalam Kantor Hukum Saiful Ramang Andi Ato' & Partner mengajukan Praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapan seorang remaja asal kota Palopo yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Selatan.





Dimana dengan persangkaan terlibat tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tim Kuasa Hukum Pemohon meyakini bahwa penetapan tersangka dan penangkapan, hingga penggeledahan rumah keluarga Pemohon sarat dengan nuansa pengebakan dengan metode pembelian terselubung, "atau setidaknya Transaksi yang dilakukan dibawah kendali Penyidik BNNP Sulawesi Selatan yang saat ini berposisi sebagai Termohon." ungkap Akbar, salah satu Tim Kuasa Hukum Pemohon usai mengikuti sidang Perdana Praperadilan.

Kuasa Hukum Pemohon yang beranggotakan lima orang Advokat Muda tanah Luwu ini yakin bahwa proses penangkapan Pemohon adalah Pengebakan yang biasa dikenal dengan istilah Undercover Buy (transaksi pembelian terselubung) atau setidaknya Control Delivery (pengiriman / transaksi dibawah kendali).

Akbar yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Yayasan Bantuan Hukum Wija Luwu menambahkan, salah satu indikasi jika penangkapan tersebut merupakan "jebakan", karena orang yang membawa dan menyerahkan barang kepada Pemohon tidak ditangkap, padahal saat dilakukan penangkapan, si pemberi barang juga ada ditempat penangkapan.

"Anehnya, si pemberi barang tidak ditangkap, sedangkan pemohon yang pada dasarnya hanya diminta menjemput dan mengantar barang justru ditangkap dan langsung dibawa pergi. Ini kan sangat aneh," ungkap Akbar.





Selain itu kata dia, indikasi kuatnya dugaan pengebakan sangat nampak di mana sebelum Pemohon tiba dilokasi, sejumlah oknum yang melakukan penangkapan sudah bersiaga ditempat penangkapan. Ini pun telah terkonfirmasi dengan sejumlah saksi mata.

“Dengan tidak ditangkapnya si pemberi barang kian memperkuat dugaan bahwa si pembawa barang merupakan agen yang sebelumnya telah diatur oleh Tim Penangkap,” sambungnya lagi.

“Ini jelas menunjukkan bahwa transaksi dilakukan dibawa kendali Tim Penangkap atau yang dikenal dengan istilah Control Delivery, dimana dalam perkara ini Tim Penangkap jadi Termohon,” imbuhnya.

Dalam gugatan praperadilan yang diajukan, Tim Kuasa Hukum Pemohon mengajukan beberapa alasan, diantaranya, pemohon ditetapkan sebagai tersangka, padahal tidak pernah menjalani proses pemeriksaan pemeriksaan sebagai calon tersangka, serta tidak adanya penyelidikan atas diri pemohon, namun tiba-tiba termohon menetapkannya sebagai tersangka, yang berakhir dengan penangkapan.

Bahkan, Tim Kuasa Hukum pemohon dalam gugatannya juga menyoal tentang penggeledahan yang dilakukan BNNP Sulawesi Selatan selaku Termohon dirumah keluarga Pemohon, karena dinilai tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Ini bukan hanya bentuk kesewenang-wenangan, tapi juga bentuk pelanggaran hukum yang nyata, yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum,” Sambung Baihaki yang juga tergabung dalam Penasihat Hukum Pemohon.





Lebih lanjut Baihaki menjelaskan, alasan lain permohonan Praperadilan yang mereka ajukan yakni upaya penyidikan yang terus menerus dilakukan Termohon, padahal Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka.

Upaya penyidikan secara “terus menerus” yang dilakukan Termohon selaku penyidik tersebut kian memperkuat dugaan Tim Penasihat Hukum pemohon jika pada dasarnya penetapan tersangka atas klien mereka tidak didasari atas bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang disyaratkan dalam KUHP, yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang standar alat bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Berdasarkan atas keyakinan itu pula, maka kami dari Tim Penasihat Hukum pemohon pun menyampaikan dalam gugatan bahwa sesungguhnya Termohon belum memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka,” sambung Chandra Makkawaru.

Selain itu, Tim Penasihat Hukum pemohon dalam gugatannya juga menyebutkan bahwa selama menjalani proses hukum pasca penangkapan, Pemohon tidak pernah didampingi Penasihat Hukum. Padahal, pasal yang dipersangkakan atas diri Pemohon diancam dengan hukuman mati.

“Ini benar-benar sebuah kezaliman yang sangat nyata,” ungkap Chandra geram.

Lebih jauh Chandra menjelaskan pendampingan hukum atas seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai





Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan disetiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.

“Dan akibat Hukum apabila hal itu tidak dilakukan, maka proses penyidikan harus dinyatakan ilegal atau tidak sah karena melanggar ketentuan hukum, khususnya Pasal 56 ayat 1 KUHP,” terang Chandra.

“Pelanggaran atas penerapan Pasal 56 ayat 1 juga telah dalam proses pemeriksaan juga telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1565K/Pid/1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum maka tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima, sekali pun dalam sidang peradilan tersangka didampingi Penasihat Hukum,” jelas Chandra.

Atas sejumlah dalil yang telah disampaikan, Tim Penasihat Hukum pemohon berharap Hakim pengadilan negeri palopo yang mengadili perkara tersebut dapat mengabulkan permohonan mereka, dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap klien mereka tidak sah, serta membebaskannya dari tahanan dan memulihkan harkat dan martabatnya.

Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari BNN Sulsel terkait praperadilan tersebut.

